LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Ahmad Yani 118 Surabaya 60231
SURABAYA, 2021

PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertangungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, Laporan Kinerja merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*.

Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja merupakan salah satu alat evaluasi untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim SAKIP yang telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak terkait sangat kami harapkan.

Surabaya, 22 Februari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640821 199011 2 001

DAFTAR ISI

		Hal
PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Struktur Organisasi	1
	B. Tugas dan Fungsi	1
	C. Isu Strategis	2
	D. Casecading Kinerja	3
	E. Peta Proses Bisnis	3
	F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	A.Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	6
	B. Perjanjian Kinerja (PK)	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. Capaian Kinerja Organisasi	14
	B. Realisasi Anggaran	22
	C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	26
BAB IV	PENUTUP	27

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

A. Pendanaan Indikatif Renstra Tahun 2019-2024

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

C. Rekapitulasi Data

D. Peta Proses Bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Struktur Organsasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

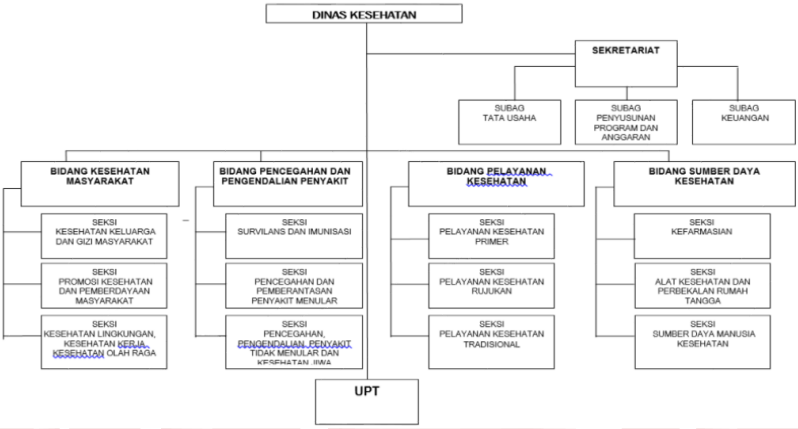

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan serta tugas pembantuan dan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Isu Strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
3. Penurunan AKI dan AKB yang lambat
4. Prevalensi stunting yang masih tinggi
5. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang masih rendah dan masih ada kabupaten/kota yang belum ODF

6. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga
7. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal
8. Belum semua penduduk di Jawa Timur menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

D. Casecading Kinerja

Casecading Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

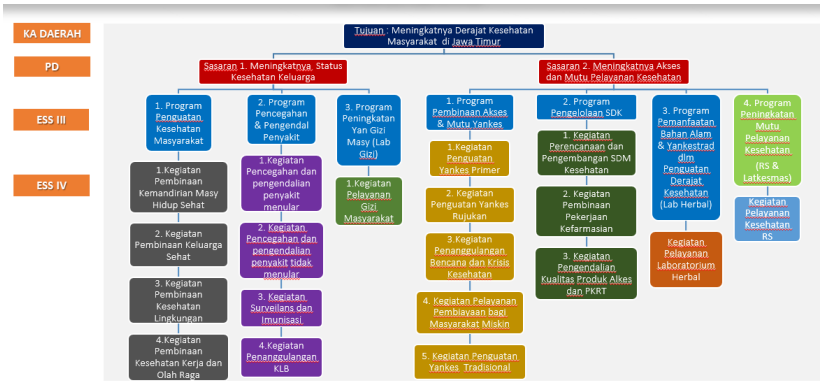

E. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

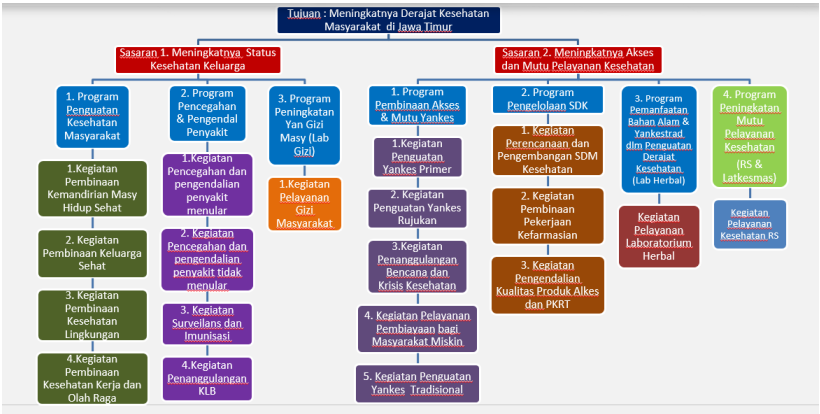

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi terhadap pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH) mendapatkan kategori baik.
2. Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna mendapatkan kategori sangat baik.

Hasil pencapaian penggunaan sumber daya semuanya 2 (100 %) sasaran stratetegis adalah efisien karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran. Tingkat efisien penggunaan sumber daya yang paling besar tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga sebesar 9,74.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat Baik (>100 %) sejumlah 1 IKU (50 %).
2. Tingkat efisisiensi penggunaan sumber daya semuanya 2 (dua) IKU (100 %) sasaran strategis adalah efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis : Tujuan, Sasaran, Kebijakan Dan Program

Rencana Strategis atau yang disebut dengan Renstra merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak perlu membuat visi dan misi tetapi menjabarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Visi pembangunan Jawa Timur periode 2019-2024 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 Misi. Untuk bidang kesehatan ada pada Misi Kedua, yaitu ”Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”.

Untuk mencapai visi dibuat Nawabhakti Satya, bidang kesehatan masuk Bhakti 3 Jatim Cerdas dan Sehat, yaitu Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar Berkualitas.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pembanguan Jawa Timur serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misi kedua pembangunan Jawa Timur menetapkan tujuan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kesehatan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan penetapan sasaran tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH).
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Paripurna.

3. Strategi

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
2. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan peran serta masyarakat.
3. Peningkatan kualitas deteksi dini masalah kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan mutu tata kelola program kesehatan.
5. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
6. Mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu melalui akreditasi.
7. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai standar.

4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja.
2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan.
3. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat.
4. Peningkatan deteksi dini secara aktif pada sasaran keluarga dengan risiko masalah kesehatan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Perencanaan dan pengendalian program berbasis data dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Pemanfaatan teknologi informasi di rumah sakit melalui *smart healthy.*
7. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal terhadap faskes untuk memenuhi standar.
8. Penguatan fasilitas dan alat kesehatan sesuai standar.
9. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi yang bermutu dan efisien.
10. Peningkatan mutu dan pemerataan SDM kesehatan

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan Kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Dinas Kesehatan
   2) Pengelolaan Administrasi Keuangan
   3) Ketatausahaan Dan Kepegawaian
2. Program Penguatan Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat
   2) Pembinaan Keluarga Sehat
   3) Pembinaan Kesehatan Lingkungan
   4) Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
   2) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
   3) Surveilans dan Imunisasi
   4) Penanggulangan KLB
4. Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3) Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
4) Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin
5) Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
   2) Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian
   3) Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
6. Program Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) Penyelenggaraan Pelayanan Gizi
   2) Pengembangan dan Kemitraan
7. Program Pemanfaatan Bahan Alam Dan Pelayanan Kestrad dalam Penguatan Derajat Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) Upaya Penguatan Mutu Produk
   2) Promosi Pemanfaatan Obat Tradisional yang Baik dan Benar
   3) Pengembangan Mutu Laboratorium Herbal
   4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
   5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tradisional yang Layak Pakai

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) target 71,38.
2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna target 60%.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 329.122.197.000,00 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2020 mendapatkan anggran sebesar Rp. 43.733.028.000,00 sehingga total anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 372.855.225.000,00 dalam rangka mencapai 2 (dua) sasaran strategis, dengan 14 program dan 61 kegiatan (terlampir).

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (*Planning*) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dan kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *controlling*.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk melihat / mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan, dengan berbagai piranti perencanaan berupa Pengukuran Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indIkator kinerja sasaran dengan

realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\ \%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \text{ x } 100\ \%$$

Sedangkan untuk katagori capaian digunakan sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3		4	5	6	7
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.38	71.30	99.89	Baik
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	60	62.34	103.90	Sangat baik

Dari tabel 3.1 diatas terlihat dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) ada 1 IKU dengan kategori capaian sangat baik (>100 %) dan 1 IKU dengan kategori capaian baik (75 % - 100 %).

Sedangkan kalau dilihat dari pencapaian yang sudah mencapai target (≥ 100 %) adalah 1 IKU (50 %).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 dan 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	
					Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (1)
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.38	71.18	71.30
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	60.00	61.04	62.34

Dari tabel 3.2 diatas terlihat dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya semuanya 2 IKU (100 %) yang naik realisasinya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET AKHIR RENSTRA 2024	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.02	71.30	Belum Tercapai
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	80.00	62.34	Belum Tercapai

Dari tabel 3.3 diatas terlihat dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 IKU (100 %) yang belum tercapai target akhir Rensta tahun 2024.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		REALISASI	REALISASI NASIONAL
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.30	71.47
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	62.34	36.24

Dari tabel 3.4 diatas terlihat dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 IKU (50 %) kalau dibandingkan dengan angka nasional angkanya berada diatas realisasi tingkat nasional dan 1 IKU (50 %) kalau dibandingkan dengan angka nasional angkanya berada dibawah realisasi tingkat nasional.

5. Analisis Penyebab Permasalahan dan Alternative Solusi

i. Penyebab Permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes).

b. Status kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang masih rendah.

c. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan

rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.

d. Masih dibutuhkannya peningkatan standar kualitas RSUD Dr. Soetomo sebagai rumah sakit berstandar internasional.
e. Belum meratanya jumlah, jenis dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
f. Belum tercapainya *universal coverage* jaminan kesehatan.
g. Masih tingginya angka *stunting*.
h. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

ii. Alternative Solusi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan status kesehatan keluarga.
b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
c. Meningkatkan upaya promotive dan preventif melalui konseling dari pintu ke pintu (Kopipu). desa sehat dan Santri Jatim Sehat dan Berkah (Sajadah).
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu. anak dan balita melalui Bunda Anak Impian (Buaian).
e. Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (tantistas).
f. Perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan.

g. Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil. tertinggal. perbatasan dan kepulauan melalui Bahari Husada (rumah sakit terapung).
h. Penguatan RSU dan RSUD Rujukan di 5 Koridor.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disampaikan penggunaan sumber daya anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 :

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	4,253,738,700	1.11
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	501,267,900	0.13
TOTAL ANGGARAN				**384,082,566,146**	**1.24**

Alokasi anggaran yang berasal dari APBD tahun 2020 untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis adalah sebesar Rp 384.082.566,00. Dari tabel 3.5. di atas terlihat alokasi yang terbesar adalah untuk sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga (1.11 %).

7. Analisis sasaran strategis yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KINERJA 2020			ANGGARAN 2020		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.38	71.30	99.89	4,253,738,700	3,834,505,742	90.14
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.	Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	60.00	62.34	103.90	501,267,900	494,194,500	98.59

Dari tabel 3.6 diatas terlihat dari 2 (dua) sasaran strategis semuanya 2 (dua) sasaran strategis tersebut (100 %) pencapaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Artinya dengan lebih besar realisasi kinerja dibandingkan dengan anggaran terjadi efisiensi penggunanaan anggaran.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	ANGKA EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	99.89	90.14	Efisien	9.74
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	103.90	98.59	Efisien	5.31

Dari tabel 3.7 diatas terlihat dari 2 (dua) Sasaran Strategis semuanya 2 (dua) Sasaran Strategis (100 %) adalah efisien

karena persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran.

Tingkat efisien penggunaan sumber daya yang paling besar tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga sebesar 9,74..

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk laporan realisasi anggaran bersumber pada APBD tahun 2020 menurut program bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 3.8.

Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2020 menurut Program

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Pelayanan Kesekretariatan	14.237.190.675	13,395,797,408	94,09
2.	Penguatan Kesehatan Masyarakat	15.285.410.000	10,429,057,668	68,23
3.	Pelayanan Gizi Masyarakat	1.324.746.200	1,197,968,284	90,43
4.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.928.992.500	2,636,537,458	90,02
5.	Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan	285.454.209.883	105,793,848,627	37,06
6.	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	62.870.359.888	61,981,092,516	98,59
7.	Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.981.657.000	1,876,178,750	94,68
JUMLAH		**384.082.566.146**	**197.310.480.711**	**51,37**

Ada perubahan alokasi anggaran dari yang direncanakan di awal tahun karena adanya pandemi covid 19, sehingga

dilakukan *refocusing* anggaran, yaitu memprioritaskan anggaran untuk menanggulangi pandemi covid 19.

Dari tabel 3.8. di atas terlihat realisasi total tahun 2020 berasal dari APBD untuk Belanja Langsung adalah sebesar 51,37 %. Rendahnya realisasi ini karena program pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang realisasi rendah, penyebabnya karena :

1. Kepastian pemanfaatan dana pajak rokok untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan cara integrasi dalam program JKN baru disepakati oleh stakeholder pada awal bulan Pebruari 2020.
2. Proses penyusunan regulasi (Peraturan Gubernur, Perjanjian Kerja Sama, Surat Keputusan penerima) dan penyiapan data awal peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Provinsi baru dapat diselesaikan pada bulan Maret 2020.
3. Pendaftaran peserta ke BPJS Kesehatan dilaksanakan pada bulan April 2020 dengan jumlah peserta yang dapat masuk dalam master file BPJS Kesehatan hanya sebanyak 57.776 jiwa
4. Sampai dengan akhir tahun 2020 kuota peserta yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi karena tidak semua calon peserta yang diusulkan kabupaten/kota dapat masuk ke dalam masterfile BPJS Kesehatan.
5. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Per Juli 2020 terdapat

penyesuaian besar iuran peserta JKN yang didaftarkan oleh Pemda dari Rp 42.000 menjadi Rp 25.500.

Sedangkan realisasi anggaran bersumber pada APBN tahun 2020 menurut program bisa dilihat di bawah ini.

Tabel 3.9.

Alokasi dan Realisasi APBN Tahun 2020 menurut Program

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI	%
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	4.072.355.000	3.530.563.010	86.70
2.	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	186.439.000	186.439.000	100.00
3.	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3.217.961.000	2.705.550.775	84.08
4.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	436.652.000	297.936.400	68.23
5.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.879.593.000	1.446.711.265	76.97
6.	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	349.478.000	312.317.300	89.37
7.	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	816.959.000	698.359.650	85.48
JUMLAH		**10.959.437.000**	**9.177.877.400**	**83.74**

Untuk alokasi dan realisasi menurut kegiatan dapat dilihat di lampiran.

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut hasil evaluasi laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja atas IKU yang sudah berhasil memenuni target.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa :

1). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat Baik (>100 %) sejumlah 1 IKU (50 %).

2). Tingkat efisisiensi penggunaan sumber daya semuanya 2 (dua) IKU (100 %) sasaran strategis adalah efisien karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Dinas Kesehatan pada khususnya.

LAMPIRAN

PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA
TAHUN 2019-2024

PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA DINAS KESAHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1020101	Dinas Kesehatan																	
Meningkatnya Derajat Kesehatan				Indeks Kesehatan	tahun		0.786		0.786		0.788		0.789		0.79		0.791		4.73	0
				indeks kesehatan	%															
	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga			AHH	tahun		71.38	16,705,250,000	71.38	17,825,000,000	71.54	18,400,000,000	71.7	20,328,750,000	71.86	21,342,555,433	72.02	20,739,350,807	429.88	115,340,906,240
		1.02.15	Program Penguatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	91.45	89.92	6,205,250,000	89.92	6,525,000,000	88.92	6,825,000,000	87.92	7,165,000,000	86.92	9,413,052,531	86	7,644,750,000	86	43,778,052,531
				Prevalensi Stunting	%	32.81	28		28		26		24		22		20		20	
				Persentase Desa Sehat	%	48.04	56.46		56.46		62.35		67.64		72.93		75.58		75.58	
		1.02.15.002	Pembinaan Keluarga Sehat	Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan di fasles sesuai target	kab/kota		12	2,750,000,000	12	2,825,000,000	15	3,050,000,000	15	3,215,000,000	18	4,065,552,531	19	3,250,000,000	91	19,155,552,531
				Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi sariputra sesuai target	kab/kota		12		12		15		15		15		17		86	
				Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang mendapat ASI Eksklusif > 50%	kab/kota		36		36		37		38		38		38		223	
		1.02.15.001	Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat	Jumlah promosi kesehatan kreatif yang dilaksanakan	tema promosi kesehatan		5	1,900,000,000	5	1,900,000,000	5	1,925,000,000	5	2,050,000,000		2,652,500,000	5	2,300,000,000	25	12,727,500,000
				Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas UKBM	kegiatan		13		13		14		15		16		17		88	
		1.02.15.005	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (DAK)																	0
		1.02.15.006	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (PBM'HT)	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif yang dilaksuan	kali														0	0
		1.02.15.003	Pembinaan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/keluarahan yang sudah ODF	desa/keluraha n		4800	1,055,250,000	4800	1,300,000,000	5300	1,325,000,000	5750	1,350,000,000	6200	1,717,500,000	6200	1,488,375,000	33050	8,236,125,000
				Persentase rumah tangga akses terhadap air bersih berkualitas (layak)	%		91		91		92		93		94		94		94	
		1.02.15.004	Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk	Pos UKK		1125	500,000,000	1125	500,000,000	1150	525,000,000	1175	550,000,000	1200	977,500,000	1200	606,375,000	6975	3,658,875,000
				Persentase Jamaah Haji yang di ukur kebugaran Jasmani	%		78		78		80		83		85		85		85	
		1.02.16	Program Pelayanan Gizi Masyarakat	% peningkatan pelayanan gizi pada kelompok rawan gizi secara paripurna	%	10	15	1,800,000,000	15	1,800,000,000	20	1,900,000,000	25	2,202,500,000	30	2,047,500,000	35	2,237,125,000	35	11,987,125,000
		1.02.16.001	Penyelenggaraan Pelayanan Gizi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan gizi idi dalam dan di luar	orang	5000	10000	800,000,000	10000	800,000,000	12500	850,000,000	15000	1,002,500,000	16500	892,500,000	20000	937,125,000	84000	5,282,125,000
		1.02.16.002	Pengembangan dan Kemitraan	Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan produk gizi yang	kegiatan	5	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	20	1,050,000,000	25	1,200,000,000	30	1,155,000,000	35	1,300,000,000	130	6,705,000,000
				Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program	dokumen	3	4		4		5		6		6		6		31	
		1.02.17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi dini kasus baru penyakit sesuai	%	8	44	8,700,000,000	44	9,500,000,000	50	9,675,000,000	55	10,961,250,000	60	9,882,002,902	65	10,857,475,807	65	59,575,728,709
				Persentase kab/kota dengan keberhasilan tatalaksana penyakit sesuai	%	42	71		71		75		78		82		87		87	
				Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai standar	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		1.02.17.001	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit menular sesuai	kab/kota		17	3,700,000,000	17	3,700,000,000	19	3,750,000,000	21	3,950,000,000	23	3,740,000,000	23	4,030,600,807	120	22,870,600,807
				Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit menular yang ditemukan sesuai target	kab/kota		27		27		29		30		32		32		177	
		1.02.17.002	Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan ibu sesuai target	kab/kota		19	3,000,000,000	19	3,380,000,000	22	3,421,500,000	25	4,011,250,000		3,552,580,462	28	4,000,000,000	113	21,365,330,462
				Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan ibu sesuai target	kab/kota		19		19		21		23		25		25		132	
		1.02.17.003	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap sesuai target	kab/kota		30	1,500,000,000	30	1,750,000,000	35	1,800,000,000	38	2,050,000,000	38	1,801,922,440	38	2,000,000,000	209	10,901,922,440
				Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target	kab/kota		30		30		35		38		38		38		209	
				Persentase KLB skala provinsi yang ditangani sesuai target	%		100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	1,800,000,000	100	2,050,000,000	100	1,801,922,440	100	2,000,000,000	100	10,901,922,440
				Jumlah Kab/kota dengan cakupan investigasi (PE/Penyelidikan	Kab/kota		30		30		35		38		38		38		209	
		1.02.17.004	Penanggulangan KLB	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada	%		100	500,000,000	100	670,000,000	100	703,500,000	100	950,000,000	100	787,500,000	100	826,875,000	100	4,437,875,000
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			Persentase RS yang terakreditasi paripurna	%		60	80,075,000,000	60	56,450,000,000	65	56,800,000,000	70	57,464,125,000	75	61,332,200,000	80	56,057,141,563	80	368,178,466,563
		1.02.18	Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase FKTP yang terakreditasi	%	22.31	35	69,525,000,000	35	47,575,000,000	45	47,725,000,000	55	47,917,500,000	65	51,314,150,000	75	45,419,125,000	75	309,475,775,000
				Persentase RS terakreditasi	%	83.42	87		87		91		94		97		100		100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019		2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		1.02.18.001	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar	puskesmas		269	2,825,000,000	269	2,655,000,000	309	2,671,500,000	349	2,717,500,000	389	5,954,150,000		3,200,000,000	1585	20,023,150,000
				Jumlah Jaringan Puskesmas yang menerapkan strategi pengi berdasaya di	Jaringan puskesmas		3011		3011		3559		4654		5476				19711	
				Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan intervensi Keluarga Sehat	Kab/kota		17		17		24				38		31		127	
		1.02.18.002	Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	pelayanan		30	1,200,000,000	30	1,250,000,000	45	1,300,000,000	60	1,350,000,000	75	1,417,500,000		1,450,000,000	240	7,967,500,000
		1.02.18.003	Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (pajak rokok)	Persentase anggaran pajak rokok untuk pendanaan program laminan kesehatan	%															0
		1.02.18.004	Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai	orang		6388	62,500,000,000	6388	41,000,000,000	6388	41,000,000,000	12776	41,000,000,000		41,000,000,000		39,000,000,000	31940	265,500,000,000
		1.02.18.005	Penguatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan	RS		38	2,500,000,000	38	2,000,000,000	42	2,050,000,000	45	2,100,000,000	51	2,155,000,000		942,250,000	214	11,747,250,000
				Jumlah Labkesda sesuai Standar	Labkesda		17		17		22		27		31				114	
				Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	RS		38		38		42		45		51				214	
		1.02.18.006	Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisi kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi				500,000,000		670,000,000		703,500,000		750,000,000		787,500,000		826,875,000		4,237,875,000
		1.02.19	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan	%	55	60	8,000,000,000	60	6,325,000,000	65	6,450,000,000	70	6,650,000,000	75	6,982,500,000	80	7,450,000,000	80	41,857,500,000
				Persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat dan vaksin	%	90	92		92		93		94		95		96		96	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar	%	60	65		65		70		75		80		85		85	
		1.02.19.001	Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan	dokumen		39	3,000,000,000	39	2,725,000,000	39	2,800,000,000	39	2,900,000,000	39	3,045,000,000	39	3,200,000,000	234	17,670,000,000
				Jumlah quality control pada pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi	dokumen		20		20		30		40		50		50		210	
		1.02.19.002	Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian	Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar	fasilitas		12	3,000,000,000	12	2,325,000,000	14	2,350,000,000	16	2,400,000,000	18	2,520,000,000		2,700,000,000	72	15,295,000,000
				Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) sesuai standar	Kab/kota		12		12		14		16		18				72	
				Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kab/kota		18		18		15		18		21				90	
		1.02.19.003	Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan PKRT sesuai standar	sarana		72	2,000,000,000	72	1,275,000,000	108	1,300,000,000	144	1,350,000,000	180	1,417,500,000		1,550,000,000	576	8,892,500,000
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes terkalibrasi	fasyankes		32		32		48		60		76				248	
		1.02.20	Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab Herbal Materia Medica, Batu	%		87	2,550,000,000	87	2,550,000,000	89	2,625,000,000	91	2,896,625,000	93	3,035,550,000	95	3,188,016,563	95	16,845,191,563
		1.02.20.001	Upaya Penguatan Mutu Produk	persentase jumlah simplisia yang memenuhi standar (FOTR)	%		60	200,000,000	60	200,000,000	70	200,000,000	75	200,000,000	80	200,000,000	80	200,000,000	80	1,200,000,000
		1.02.20.003	Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat	orang		4000	250,000,000	4000	250,000,000	5000	250,000,000	6000	360,000,000	7000	375,000,000	8000	395,000,000	34000	1,880,000,000
		1.02.20.003	Pengembangan mutu laboratorium herbal	Persentase hasil mutu laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory	%		35	250,000,000	35	250,000,000	40	262,500,000	45	361,625,000	50	376,800,000	55	395,079,063	55	1,896,004,063
		1.02.20.004	Pelayanan Kesehatan Tradisonal	Jumlah pengunjung sarana kesehatan tradisional di Griya sehat UPTD	orang		960	250,000,000	960	250,000,000	1200	262,500,000	1300	275,000,000	1400	298,750,000	1440	323,687,500	7260	1,659,937,500
		1.02.20.005	Pengembangan sarana dan prasarana kes tradi yang layak pakai	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan tradisional di UPTD yang	%		65	1,600,000,000	65	1,600,000,000	70	1,650,000,000	75	1,700,000,000	80	1,785,000,000	85	1,874,250,000	85	10,209,250,000
	Meningkatnya akutabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah			82.94	21,200,688,210	82.94	23,368,553,300	83.18	23,901,837,000	83.42	22,848,154,200	83.66	20,707,747,667	83.9	30,375,968,130	83.9	142,402,948,507
		1.02.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	%	85.71	86	21,200,688,210	86	23,368,553,300	88	23,901,837,000	88	22,848,154,200	90	20,707,747,667	94	30,375,968,130	94	142,402,948,507
				Persentase realisasi anggaran	%	92.09	92.2		92.2		92.4		92.6		92.8		93		93	
				Indeks profesionalitas ASN			86.5		86.5		87		87.5		88		88.5		524	
		1.02.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	%		100	1,500,000,000	100	1,565,000,000	100	1,643,250,000		1,700,337,500		1,820,004,375		2,671,488,032	100	10,900,079,907
		1.02.01.002	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	%			6,150,000,000		7,116,419,700		7,158,278,586		7,206,841,156		7,241,850,221		9,276,292,374		44,149,682,037
		1.02.01.003	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian				13,550,688,210		14,687,133,600		15,100,308,414		13,940,975,544		11,645,893,071		18,428,187,724	0	87,353,186,563
								117,980,938,210		**97,643,553,300**		**99,101,837,000**		**100,641,029,200**		**103,382,503,100**		**107,172,460,500**		**625,922,321,310**

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLIN FERLIANA

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2020

Pihak Kedua, **GUBERNUR JAWA TIMUR**	Pihak Pertama, **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA	**HERLIN FERLIANA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,38
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	2. Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	60%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Kesekretariatan	Rp	17.233.011.338,00	APBD
2	Penguatan Kesehatan Masyarakat	Rp	13.835.410.000,00	APBD
3	Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp	2.097.563.662,00	APBD
4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp	3.750.000.000,00	APBD
5	Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rp	281.815.220.000,00	APBD
6	Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Rp	8.040.992.000,00	APBD
7	Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rp	2.350.000.000,00	APBD
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Kesehatan	Rp	5.548.940.000,00	APBN
9	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan	Rp	2.115.201.000,00	APBN
10	Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Rp	15.925.404.000,00	APBN
11	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Rp	1.292.599.000,00	APBN
12	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp	7.776.569.000,00	APBN
13	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Rp	2.537.478.000,00	APBN
14	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)	Rp	8.536.837.000,00	APBN
	Jumlah	**Rp**	**372.855.225.000,00**	

Surabaya, Januari 2020

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

HERLIN FERLIANA

REKAPITULASI DATA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN ALOKASI DAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : **(102) Kesehatan**

ORGANISASI : **(0101) Dinas Kesehatan**

Nomor Urut								Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
										Rp.	%
1								2	3	4	5
1	**02**	**0101**	**00**	**000**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**	**414.280.000,00**	**442.289.426,18**	**106,76**
1	**02**	**0101**	**00**	**000**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**414.280.000,00**	**442.289.426,18**	**106,76**
1	02	0101	00	000	4	1	2	RETRIBUSI DAERAH	393.342.000,00	355.313.650,00	90,33
1	02	0101	00	000	4	1	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	20.938.000,00	86.975.776,18	415,40
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH									**414.280.000,00**	**442.289.426,18**	**106,76**
1	**02**	**0101**	**00**	**000**	**5**			**BELANJA DAERAH**	**453.783.408.146,00**	**259.415.747.942,55**	**57,17**
1	**02**	**0101**	**00**	**000**	**5**	**1**		**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**69.700.842.000,00**	**62.105.267.231,00**	**89,10**
1	02	0101	00	000	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	69.700.842.000,00	62.105.267.231,00	89,10
1	**02**	**0101**	**00**	**000**	**5**	**2**		**BELANJA LANGSUNG**	**384.082.566.146,00**	**197.310.480.711,55**	**51,37**
1	**02**	**0101**	**01**					**Program Pelayanan Kesekretariatan**	**14.237.190.675,00**	**13.395.797.408,00**	**94,09**
1	**02**	**0101**	**01**	**001**				***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah***	**255.721.000,00**	**250.257.380,00**	**97,86**
1	02	0101	01	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	255.721.000,00	250.257.380,00	97,86
1	**02**	**0101**	**01**	**002**				***Pengelolaan Administrasi Keuangan***	**1.779.844.475,00**	**1.627.824.311,00**	**91,46**
1	02	0101	01	002	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	1.065.251.000,00	926.377.500,00	86,96
1	02	0101	01	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	669.593.475,00	660.393.711,00	98,63
1	02	0101	01	002	5	2	3	BELANJA MODAL	45.000.000,00	41.053.100,00	91,23
1	**02**	**0101**	**01**	**003**				***Ketatausahaan dan Kepegawaian***	**12.201.625.200,00**	**11.517.715.717,00**	**94,39**
1	02	0101	01	003	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4.372.900.000,00	4.087.637.000,00	93,48
1	02	0101	01	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.635.125.080,00	6.274.769.894,00	94,57
1	02	0101	01	003	5	2	3	BELANJA MODAL	1.193.600.120,00	1.155.308.823,00	96,79
1	**02**	**0101**	**15**					**Program Penguatan Kesehatan Masyarakat**	**15.285.410.000,00**	**10.429.057.668,00**	**68,23**
1	**02**	**0101**	**15**	**001**				***Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat***	**1.000.000.000,00**	**878.629.240,00**	**87,86**
1	02	0101	15	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	995.489.000,00	874.139.150,00	87,81
1	02	0101	15	001	5	2	3	BELANJA MODAL	4.511.000,00	4.490.090,00	99,54
1	**02**	**0101**	**15**	**002**				***Pembinaan Keluarga Sehat***	**2.500.000.000,00**	**2.000.803.542,00**	**80,03**
1	02	0101	15	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.412.000.000,00	1.916.011.542,00	79,44
1	02	0101	15	002	5	2	3	BELANJA MODAL	88.000.000,00	84.792.000,00	96,35
1	**02**	**0101**	**15**	**003**				***Pembinaan Kesehatan Lingkungan***	**500.000.000,00**	**483.040.478,00**	**96,61**
1	02	0101	15	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	474.000.000,00	467.585.478,00	98,65
1	02	0101	15	003	5	2	3	BELANJA MODAL	26.000.000,00	15.455.000,00	59,44
1	**02**	**0101**	**15**	**004**				***Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga***	**50.000.000,00**	**49.972.000,00**	**99,94**
1	02	0101	15	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	49.972.000,00	99,94

Nomor Urut								Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
										Rp.	%
1								2	3	4	5
1	**02**	**0101**	**15**	**005**				***Pembinaan Kesehatan Masyarakat (DAK)***	**9.735.410.000,00**	**5.696.065.158,00**	**58,51**
1	02	0101	15	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.735.410.000,00	5.696.065.158,00	58,51
1	**02**	**0101**	**15**	**007**				***Upaya Promotif dan Preventif Penanganan Covid-19***	**1.500.000.000,00**	**1.320.547.250,00**	**88,04**
1	02	0101	15	007	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000.000,00	1.320.547.250,00	88,04
1	**02**	**0101**	**16**					**Program Pelayanan Gizi Masyarakat**	**1.324.746.200,00**	**1.197.968.284,00**	**90,43**
1	**02**	**0101**	**16**	**001**				***Penyelenggaraan Pelayanan Gizi***	**1.000.000.000,00**	**879.483.542,00**	**87,95**
1	02	0101	16	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	819.330.000,00	705.157.742,00	86,07
1	02	0101	16	001	5	2	3	BELANJA MODAL	180.670.000,00	174.325.800,00	96,49
1	**02**	**0101**	**16**	**002**				***Pengembangan dan Kemitraan***	**324.746.200,00**	**318.484.742,00**	**98,07**
1	02	0101	16	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.746.200,00	270.084.742,00	98,30
1	02	0101	16	002	5	2	3	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.400.000,00	96,80
1	**02**	**0101**	**17**					**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	**2.928.992.500,00**	**2.636.537.458,00**	**90,02**
1	**02**	**0101**	**17**	**001**				***Pencegahan dan pengendalian penyakit menular***	**179.265.000,00**	**171.789.497,00**	**95,83**
1	02	0101	17	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	179.265.000,00	171.789.497,00	95,83
1	**02**	**0101**	**17**	**002**				***Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular***	**386.853.500,00**	**382.668.279,00**	**98,92**
1	02	0101	17	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	366.938.500,00	362.753.279,00	98,86
1	02	0101	17	002	5	2	3	BELANJA MODAL	19.915.000,00	19.915.000,00	100,00
1	**02**	**0101**	**17**	**003**				***Surveilans dan Imunisasi***	**2.100.000.000,00**	**1.832.524.309,00**	**87,26**
1	02	0101	17	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.815.000.000,00	1.561.472.409,00	86,03
1	02	0101	17	003	5	2	3	BELANJA MODAL	285.000.000,00	271.051.900,00	95,11
1	**02**	**0101**	**17**	**004**				***Penanggulangan KLB***	**262.874.000,00**	**249.555.373,00**	**94,93**
1	02	0101	17	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	262.874.000,00	249.555.373,00	94,93
1	**02**	**0101**	**18**					**Program Pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan**	**285.454.209.883,00**	**105.793.848.627,00**	**37,06**
1	**02**	**0101**	**18**	**001**				***Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer***	**609.989.200,00**	**587.258.317,00**	**96,27**
1	02	0101	18	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	603.689.200,00	582.773.318,00	96,54
1	02	0101	18	001	5	2	3	BELANJA MODAL	6.300.000,00	4.484.999,00	71,19
1	**02**	**0101**	**18**	**002**				***Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional***	**320.000.000,00**	**319.869.650,00**	**99,96**
1	02	0101	18	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	230.955.000,00	230.824.650,00	99,94
1	02	0101	18	002	5	2	3	BELANJA MODAL	89.045.000,00	89.045.000,00	100,00
1	**02**	**0101**	**18**	**003**				***Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional***	**253.125.000.000,00**	**78.203.599.600,00**	**30,90**
1	02	0101	18	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	253.125.000.000,00	78.203.599.600,00	30,90
1	**02**	**0101**	**18**	**004**				***Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin***	**30.729.367.083,00**	**26.021.624.050,00**	**84,68**
1	02	0101	18	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.696.650.583,00	25.988.907.550,00	84,66
1	02	0101	18	004	5	2	3	BELANJA MODAL	32.716.500,00	32.716.500,00	100,00
1	**02**	**0101**	**18**	**005**				***Penguatan pelayanan kesehatan rujukan***	**501.267.900,00**	**494.194.500,00**	**98,59**
1	02	0101	18	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	473.506.400,00	466.433.000,00	98,51
1	02	0101	18	005	5	2	3	BELANJA MODAL	27.761.500,00	27.761.500,00	100,00
1	**02**	**0101**	**18**	**006**				***Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan***	**168.585.700,00**	**167.302.510,00**	**99,24**
1	02	0101	18	006	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.585.700,00	167.302.510,00	99,24
1	02	0101	18	006	5	2	3	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut								Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
										Rp.	%
1								2	3	4	5
1	**02**	**0101**	**19**					**Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan**	**62.870.359.888,00**	**61.981.092.516,55**	**98,59**
1	**02**	**0101**	**19**	**001**				***Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan***	**1.025.712.465,00**	**1.007.220.265,00**	**98,20**
1	02	0101	19	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.006.187.465,00	987.695.265,00	98,16
1	02	0101	19	001	5	2	3	BELANJA MODAL	19.525.000,00	19.525.000,00	100,00
1	**02**	**0101**	**19**	**002**				***Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian***	**1.112.720.250,00**	**993.043.898,00**	**89,24**
1	02	0101	19	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.088.720.250,00	969.158.498,00	89,02
1	02	0101	19	002	5	2	3	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.885.400,00	99,52
1	**02**	**0101**	**19**	**003**				***Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)***	**420.340.000,00**	**377.418.500,00**	**89,79**
1	02	0101	19	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	395.840.000,00	361.512.500,00	91,33
1	02	0101	19	003	5	2	3	BELANJA MODAL	24.500.000,00	15.906.000,00	64,92
1	**02**	**0101**	**19**	**004**				***Pelayanan Kefarmasian (DAK)***	**2.240.992.000,00**	**1.859.148.900,00**	**82,96**
1	02	0101	19	004	5	2	3	BELANJA MODAL	2.240.992.000,00	1.859.148.900,00	82,96
1	**02**	**0101**	**19**	**005**				***Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***	**58.070.595.173,00**	**57.744.260.953,55**	**99,44**
1	02	0101	19	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.070.595.173,00	57.744.260.953,55	99,44
1	**02**	**0101**	**20**					**Program Peningkatan Pemanfaatan Bahan Alam dan Pelayanan Kesehatan Tradisional**	**1.981.657.000,00**	**1.876.178.750,00**	**94,68**
1	**02**	**0101**	**20**	**001**				***Upaya Penguatan Mutu Produk***	**459.301.000,00**	**442.750.736,00**	**96,40**
1	02	0101	20	001	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	459.301.000,00	442.750.736,00	96,40
1	**02**	**0101**	**20**	**002**				***Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar***	**92.950.000,00**	**85.674.540,00**	**92,17**
1	02	0101	20	002	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.950.000,00	85.674.540,00	92,17
1	02	0101	20	002	5	2	3	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**0101**	**20**	**003**				***Pengembangan mutu laboratorium herbal***	**353.023.500,00**	**335.901.575,00**	**95,15**
1	02	0101	20	003	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.413.500,00	114.607.675,00	92,12
1	02	0101	20	003	5	2	3	BELANJA MODAL	228.610.000,00	221.293.900,00	96,80
1	**02**	**0101**	**20**	**004**				***Pelayanan Kesehatan Tradisonal***	**113.659.000,00**	**100.394.415,00**	**88,33**
1	02	0101	20	004	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.159.000,00	97.003.665,00	88,06
1	02	0101	20	004	5	2	3	BELANJA MODAL	3.500.000,00	3.390.750,00	96,88
1	**02**	**0101**	**20**	**005**				***Pengembangan sarana dan prasarana kes trad yang layak pakai***	**962.723.500,00**	**911.457.484,00**	**94,67**
1	02	0101	20	005	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	406.918.500,00	362.662.099,00	89,12
1	02	0101	20	005	5	2	3	BELANJA MODAL	555.805.000,00	548.795.385,00	98,74
JUMLAH BELANJA DAERAH									**453.783.408.146,00**	**259.415.747.942,55**	**57,17**
SURPLUS / (DEFISIT)									**(453.369.128.146,00)**	**(258.973.458.516,37)**	**57,12**
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)									**(453.369.128.146,00)**	**(258.973.458.516,37)**	**57,12**

PAGU DAN REALISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
PROGRAM DAN KEGIATAN APBN TAHUN 2020

NO		PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	Rp	%
1		2	3	4	5
Satker Dinkes Prov Jatim 01 (050009)					
024.01.01		**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan**			
1	2035	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	14,699,000	11,914,000	81.05
2	2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	613,786,000	568,128,888	92.56
3	2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	388,792,000	330,704,800	85.06
4	2041	Peningkatan Kesehatan Jamaah Haji	3,055,078,000	2,619,815,322	85.75
024.01.11		**Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional**	**186,439,000**		
1	5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	186,439,000	186,439,000	100.00
		JUMLAH	**4,258,794,000**	**3,717,002,010**	**87.28**
Satker Dinkes Prov. Jatim 03 (059006)					
024.03.06		**Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat**			
1	2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	608,961,000	500,166,000	82.13
2	2085	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	404,662,000	301,556,100	74.52
3	2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	839,003,000	768,544,200	91.60
4	5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	252,861,000	196,008,000	77.52
5	5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	812,819,000	706,253,375	86.89
6	5834	Penyehatan Lingkungan	299,655,000	233,023,100	77.76
		JUMLAH	**3,217,961,000**	**2,705,550,775**	**84.08**
Satker Dinkes Prov. Jatim 04 (059007)					
024.04.07		**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**			
1	2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	36,750,000	30,802,000	83.81
2	2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan	128,989,000	68,138,000	52.82
3	5836	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	270,913,000	198,996,000	73.45
		JUMLAH	**436,652,000**	**297,936,000**	**68.23**
Satker Dinkes Prov. Jatim 05 (059008)					
024.05.08		**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**			
1	2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	577,600,000	281,783,700	48.79
2	2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik	178,560,000	156,953,400	87.90
3	2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	361,828,000	355,360,000	98.21
4	2061	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	373,120,000	331,557,405	88.86
5	2063	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit	188,485,000	149,992,860	79.58
6	5837	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA	200,000,000	171,063,900	85.53
		JUMLAH	**1,879,593,000**	**1,446,711,265**	**76.97**

NO		PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	Rp	%
1		2	3	4	5
Satker Dinkes Prov Jatim 07 (059009)					
024.07.09		**Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan**			
1	2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	14,580,000	8,610,000	59.05
2	2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	44,340,000	34,689,000	78.23
3	2068	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	254,633,000	238,113,300	93.51
4	5839	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	35,925,000	30,905,000	86.03
		JUMLAH	**349,478,000**	**312,317,300**	**89.37**
Satker Dinkes Prov Jatim 12 (059010)					
024.12.10		**Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)**			
1	2076	Pelatihan SDM Kesehatan	396,590,000	389,350,000	98.17
2	2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	29,238,000	15,754,500	53.88
3	2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	391,131,000	293,255,150	74.98
		JUMLAH	**816,959,000**	**698,359,650**	**85.48**
		TOTAL	**10,959,437,000**	**9,177,877,000**	**83.74**

PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :